

WEBSITE JAGA FAKTA SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI DAN PENGELOLAAN HOAKS DI KOTA SEMARANG

Muhammad Falih Abrar*), Nunik Retno Herawati**)

Email: muhammadfalih91@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Website* Kanal Jaga Fakta sebagai inovasi *e-government* di Kota Semarang dalam mempublikasikan dan mengelola informasi anti-hoaks. Fokus kajian diarahkan pada latar belakang terciptanya *website*, faktor-faktor pendorong, serta manfaatnya bagi masyarakat, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaga Fakta lahir dari kebutuhan menjaga ekosistem informasi, terutama pada masa pandemi dan menjelang Pilkada 2024. Inovasi ini didorong oleh keunggulan relatif, kesesuaian dengan struktur kelembagaan, serta tahapan uji coba bersama *stakeholder* terkait. Namun, *website* ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek keterbukaan terhadap kritik, serta transparansi sumber informasi dan pendanaan. Analisis tambahan menggunakan indikator *fact-checking* menunjukkan bahwa meskipun kanal ini telah membangun kerja kolaboratif lintas instansi, transparansi metodologi dan ruang umpan balik publik masih perlu diperkuat. Dengan demikian, inovasi ini merupakan langkah strategis menuju pemerintahan berbasis digital yang responsif terhadap disinformasi, namun tetap memerlukan penguatan aspek akuntabilitas publik.

Kata kunci: *E-Government*, Inovasi, Jaga Fakta, Hoaks, *Fact-checking*, Kota Semarang

ABSTRACT

This study aims to analyze the website of the Jaga Fakta as an e-government innovation in Semarang City for publishing and managing anti-hoax information. Using a qualitative approach and in-depth interviews, the research explores the background, driving factors, and benefits of this innovation. The findings indicate that Jaga Fakta emerged from the need to safeguard the information ecosystem during the COVID-19 pandemic and the lead-up to the 2024 local elections. It demonstrates relative advantage, institutional compatibility, and stakeholder collaboration. However, the platform lacks transparency in funding, information sources, and public feedback

mechanisms. Additional analysis using IFCN's fact-checking indicators shows that although the channel is supported by cross-sector cooperation, it still requires improvements in methodology transparency and public accountability. Overall, Jaga Fakta is a strategic step toward responsive digital governance but needs further reinforcement in openness and participatory mechanisms.

Keywords: E-Government, Policy Innovation, Jaga Fakta, Hoax, Fact-checking, Semarang City

PENDAHULUAN

Kehidupan di dunia maya seakan sudah menjadi gaya hidup dan hak asasi baru bagi masyarakat. Dampak dari pertukaran informasi yang sangat mudah dan cepat tersebut salah satunya adalah betapa mudahnya informasi—berita atau hal-hal yang tidak penting sekalipun—menyebarkan ke segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Namun, penyebaran informasi yang sangat mudah ini bagai pisau bermata dua, karena di balik manfaatnya untuk masyarakat global yang dapat lebih mudah mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain, seringkali informasi yang beredar merupakan informasi yang salah, palsu, dan bohong, atau yang lebih lazim disebut sebagai hoaks.

Kota Semarang juga tidak luput dari penyebaran berita hoaks di internet. Dikutip dari laman akun Instagram resmi Diskominfo Kota Semarang—berdasarkan data dari Kemkominfo—jumlah hoaks yang tercatat sepanjang tahun 2023 sendiri berjumlah 15 kasus berita, sedangkan hasil observasi dari laman resmi Website Jaga Fakta terdapat setidaknya 51 publikasi berita hoaks yang berhasil dikonfirmasi hingga November 2024. Dilansir dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sempat beredar berita hoaks tentang larvasida dan

fogging berbayar mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kota Semarang (Komdigi, 2024).

Pemkot Semarang tentu memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi atas maraknya hoaks yang beredar di masyarakat, sehingga dapat menciptakan iklim informasi yang sehat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya sendiri. Berlandaskan hal di atas, akhirnya Pemerintah Kota Semarang berinovasi dalam bidang *e-government* dengan meluncurkan Website Jejaring Pengawasan Fungsi Anti Hoaks Kota Semarang atau disingkat Jaga Fakta.

Dian Aryanto selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Diskominfo Kota Semarang, dalam pernyataannya yang dikutip dari Antara Jateng (Laeis, 2024), menyatakan bahwa *Website* Jaga Fakta Semarang adalah inovasi dalam bentuk *platform* untuk mengelola hoaks di Semarang agar masyarakat tidak menjadi korban. Jaga Fakta berfungsi untuk menangkal isu-isu hoaks yang beredar dengan cara menindak lanjuti laporan masyarakat yang masuk ke *website*, mengkonfirmasi isu tersebut ke pihak berwenang, lalu mempublikasi kembali berita yang sudah dikonfirmasi ke masyarakat, dengan pernyataan apakah isu

tersebut benar adanya atau hoaks. Jaga Fakta juga menggandeng institusi lain untuk membantu penangkalan isu-isu yang masuk, seperti kepolisian, Bawaslu, KPU, dan kementerian.

Mukhamad Khadik selaku P.J. Sekda Kota Semarang dalam paparannya pada acara Uji Visitasi Komisi Informasi Pemprov Jateng (24/10) dalam laman PPID Semarang menuturkan bahwa dasar hukum yang menaungi *Website* Jaga Fakta tertuang dalam SK Wali Kota Semarang Nomor 000.6.4.2/611 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Jejaring Pengawasan Fungsi Anti Hoaks Kota Semarang (JAGA FAKTA) (PPID Kota Semarang, 2024).

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami latar belakang terciptanya inovasi pada bidang *e-Government Website* Jaga Fakta Semarang sebagai media publikasi dan pengelolaan hoaks. Diharapkan dengan mengetahui latar belakang terciptanya inovasi kebijakan ini, masyarakat menjadi lebih percaya dengan *Website* Jaga Fakta, menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas inovasi-inovasi barunya, serta mendorong pemerintah untuk lebih mengembangkan *website* ini jika nantinya terdapat celah-celah yang ditemukan agar dapat mengurangi penyebaran hoaks di Kota Semarang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan berbasis data yang lebih terfokus pada transparansi dan partisipasi publik.

Selain itu, temuan penelitian dapat menjadi referensi bagi daerah lain untuk mengembangkan platform serupa guna memperkuat literasi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada akhirnya mendukung pencapaian prinsip-prinsip *good governance*, serta mendorong peneliti lain untuk meneliti topik ini lebih dalam lagi.

TINJAUAN TEORI

Kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori untuk menganalisa Jaga Fakta sebagai media publikasi dan pengelolaan hoaks di Kota Semarang. Teori-teori tersebut adalah E-Government, Inovasi, dan Fact-Checking. Masing-masing dari ketiga teori di atas memiliki indikator-indikator kunci yang akan digunakan untuk membedah lebih dalam Jaga Fakta.

E-government atau *electronic government* (pemerintahan elektronik) secara garis besar dapat didefinisikan sebagai konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), terutama internet, untuk memberikan layanan publik, meningkatkan efisiensi administratif, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. *E-government* bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang lebih transparan, efisien, dan interaktif antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi lainnya.

Berdasarkan penelitian dari *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit, untuk berhasil dalam menerapkan gagasan-gagasan e-government di sektor publik,

terdapat tiga unsur krusial yang harus dipertimbangkan, yaitu dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan nilai (*value*) (Indrajit, Konsep dan Strategi Electronic Government, 2016). Ketiga unsur tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dukungan (*Support*) yang berkenaan dengan komitmen pemerintah dalam menerapkan konsep digitalisasi pelayanan secara penuh. Budaya birokrasi yang cenderung menggunakan model manajemen "top down" berarti bahwa dukungan untuk penerapan digitalisasi pelayanan yang efektif harus dimulai dari tingkat pemerintahan tertinggi dan menyebar ke tingkat bawah.
2. Kapasitas (*Capacity*), bersinggungan dengan kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan digitalisasi pelayanan.
3. Nilai (*Value*), berkenaan dengan manfaat yang nantinya akan dihasilkan dari program yang akan diterapkan. Usaha-usaha untuk mengembangkan digitalisasi pelayanan tidak akan efektif apabila tidak ada satupun pihak yang merasakan manfaat dari implementasi konsep tersebut, terutama dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan (*demand side*).

Sedangkan untuk inovasi dalam pemerintahan dapat dianggap sebagai sesuatu yang relatif baru, mengingat istilah "inovasi" sebelumnya lebih sering dikaitkan dengan sektor bisnis daripada sektor publik. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kelman (Kelman, 2005), yang menyatakan bahwa sektor publik tertinggal dibandingkan sektor bisnis dalam hal dinamika inovasi. Kelman juga menjelaskan bahwa awalnya tulisan-tulisan terkait teori organisasi lebih banyak berfokus

pada organisasi sektor publik dibandingkan sektor bisnis.

Menurut Everett M. Rodgers, inovasi didefinisikan sebagai ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya (Rodgers, 1983). Penelitian ini kedepannya akan menggunakan beberapa atribut yang diambil dari buku *Difusion of Innovation* yang ditulis oleh Everett M. Rodgers berupa konsep adopsi inovasi kepada masyarakat. Konsep ini akan digunakan untuk melihat bagaimana proses pemanfaatan atau adopsi inovasi kebijakan diterima oleh penyelenggara dan pengguna, yang dalam hal ini Diskominfo Kota Semarang serta masyarakat Kota Semarang sebagai pengguna. Adapun atribut dalam konsep adopsi inovasi kebijakan Rodgers antara lain; *relative advantage*, *compability*, *complexity*, *triability*, dan *observability*. Penjelasan lebih lanjut akan kelima indikator di atas adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan relatif (*relative advantage*). Keuntungan relatif adalah atribut yang menunjukkan nilai lebih atau manfaat yang ditawarkan oleh sebuah inovasi dibandingkan dengan cara atau sistem sebelumnya. Karakteristik ini menjadi pembeda utama inovasi tersebut, menciptakan nilai baru yang dapat menarik minat adopsi oleh individu atau organisasi.
2. Kesesuaian (*compatibility*). Kesesuaian adalah sejauh mana sebuah inovasi dianggap selaras dengan nilai-nilai, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan calon pengadopsinya, dalam hal ini masyarakat. Artinya, inovasi baru tidak bertujuan untuk sepenuhnya menggantikan atau bertentangan dengan

inovasi sebelumnya, melainkan membangun atau berkembang dari dasar inovasi yang sudah ada.

3. Kerumitan (*complexity*). Kerumitan merupakan atribut inovasi yang merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dianggap sulit untuk dipahami atau digunakan oleh calon pengadopsi. Inovasi yang memiliki tingkat kebaruan tinggi sering kali diiringi dengan kerumitan yang lebih besar.
4. Kemungkinan untuk diuji coba (*triability*). Kemungkinan untuk diuji coba atau *triability* merupakan atribut inovasi yang mengacu pada sejauh mana inovasi dapat diujicobakan sebelum diadopsi sepenuhnya.
5. Kemudahan untuk diamati (*observability*). *Observability* merujuk pada sejauh mana suatu inovasi dapat dengan mudah dilihat dan diamati oleh banyak orang, baik dari segi proses implementasinya maupun manfaat yang diperoleh dari inovasi tersebut.

Konsep pemeriksaan fakta mulai dikenal luas di New York pada era 1920-an. Pada saat itu, majalah *Time* mengemukakan pentingnya keberadaan tim editorial yang bertugas meninjau isi publikasi agar akurat dan objektif sebelum diterbitkan (Fabry, 2017). Pemeriksa fakta bertanggung jawab untuk menelusuri klaim-klaim yang dapat dibuktikan kebenarannya, kemudian memverifikasi atau menyangkalnya. Karena kredibilitas merupakan salah satu faktor utama dalam kesuksesan media jurnalistik, kehadiran unit pemeriksa fakta pun dengan cepat menjadi bagian penting di berbagai redaksi. Seiring waktu, pemeriksaan fakta pun dipandang sebagai elemen esensial dalam praktik jurnalisme yang berkualitas.

Berdasarkan tulisan Jarrette dan Kotova dalam Daly yang berjudul “*Immersive Truth: How Groups and their Stories Construct and Deconstruct Propaganda in the Digital Age*”, pada tahun 2015, *International Fact-checking Network (IFCN)* merilis kode etik internasional untuk membantu organisasi-organisasi cek fakta lainnya dalam menjalankan tugasnya (Daly, 2024). Kode etik tersebut diantaranya adalah:

1. Netralitas. Netralitas atau *A Commitment to Non-partisanship and Fairness* berarti seorang *fact-checker* tidak boleh memiliki afiliasi politik atau keberpihakan terhadap kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.
2. Transparansi Sumber Informasi. Transparansi sumber atau *A Commitment to Standards and Transparency of Sources* maksudnya adalah semua informasi yang diperiksa harus merujuk pada sumber yang dapat diverifikasi. Pembaca harus bisa mengakses sumber aslinya secara langsung.
3. Transparansi Pendanaan. Transparansi pendanaan atau *A Commitment to Transparency of Funding & Organization* bermaksud untuk menjelaskan siapa yang menjalankan proyek dan bagaimana pembiayaannya.
4. Transparansi Metodologi. Transparansi metodologi (*A commitment to Standards and Transparency of Methodology*) berarti organisasi *fact-checking* wajib menjelaskan bagaimana proses pengecekan dilakukan, termasuk metode yang dipakai, siapa yang melakukannya, dan alat apa yang digunakan.
5. Keterbukaan pada Kritik. Keterbukaan pada kritik atau *A Commitment to an Open & Honest Corrections Policy* memiliki arti bahwa *fact-checking* juga harus membuka

ruang bagi pembaca untuk menyampaikan kritik, protes, atau sanggahan disertai bukti, agar prosesnya tetap akuntabel.

Kelima kode etik cek fakta di atas kedepannya akan digunakan dalam penelitian ini guna meneliti Jaga Fakta sebagai media publikasi yang menggunakan cek fakta sebagai mekanisme utama dalam menjalankan tugasnya di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai Jaga Fakta. Lokasi penelitian berpusat di Kota Semarang, dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara langsung di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang serta observasi terhadap laman resmi Jaga Fakta (<https://jagafakta.semarangkota.go.id/>). Subjek penelitian mencakup pejabat Diskominfo yang terlibat langsung dalam *website* ini serta masyarakat Kota Semarang sebagai penerima layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi literatur yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal utama yang melatar belakangi serta fenomena pemicu lahirnya *website* Jaga Fakta adalah bahwa gagasan untuk membuat

platform anti hoaks dengan lingkup yang terfokus di Kota Semarang saja sudah ada sejak pandemi Covid-19 di 2020 lalu, dan menjadi lebih spesifik sebagai *website* Jaga Fakta pada awal 2024, yang keduanya bertujuan untuk mengolah dan memverifikasi berita hoaks yang tersebar di masyarakat Kota Semarang, karena hoaks dianggap dapat menyesatkan bangsa.

Sedangkan analisa mendalam mengenai Jaga Fakta dengan menggunakan indikator-indikator *e-government* adalah sebagai berikut:

1. Dukungan (*Support*). *Website* Jaga Fakta dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya mendapatkan banyak sekali dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kota Semarang, seperti Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Kesbangpol, Satpol PP, dan Polrestabes Kota Semarang. Dukungan yang diberikan berupa ikut sertanya OPD di atas dalam diskusi perumusan *website* Jaga Fakta dan ikut andilnya dalam memverifikasi laporan berita hoaks yang masuk ke Jaga Fakta. Kesimpulannya, *website* Jaga Fakta mendapat cukup dukungan dari lembaga pemerintahan lainnya di Kota Semarang. Dukungan-dukungan tersebut berupa hadirnya lembaga lain dalam diskusi awal perencanaan pembentukan Jaga Fakta, serta membantu memverifikasi laporan berita hoaks yang masuk ke *website* Jaga Fakta.
2. Kapasitas (*Capacity*). Kapasitas (*capacity*) dalam *e-government* mengacu pada kesiapan teknologi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam mendukung keberlanjutan suatu inovasi digital. Dalam konteks *Website* Jaga Fakta, penting untuk

menganalisis apakah *website* ini memiliki sistem yang andal, tenaga kerja yang kompeten, serta sarana yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Diskominfo dengan yakin menyebut bahwa *website* Jaga Fakta dipastikan handal dalam mengelola isu hoaks yang tersebar karena memiliki jaringan antar *stakeholder* yang sudah sangat terstruktur. Narasumber juga mengatakan bahwa SOP yang sudah dimiliki oleh tim verifikasi Jaga Fakta, dimana proses verifikasi laporan yang masuk tidak boleh melebihi waktu 3 jam dari diterimanya laporan. *Website* Jaga Fakta bisa dikatakan memiliki kapasitas yang cukup dalam mengelola isu hoaks yang beredar di Kota Semarang. Hal itu tercermin dari SDM yang dimiliki, *stakeholder* yang dirangkul, dan SOP yang dipegang dalam menjalankan semua sistemnya.

3. Nilai (*Value*). Nilai (*value*) dari suatu inovasi dalam *e-government* mencerminkan sejauh mana manfaat yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam konteks *Website* Jaga Fakta, penting untuk menilai apakah *website* ini benar-benar memberikan nilai tambah dalam menangkal hoaks serta meningkatkan literasi digital masyarakat Kota Semarang. Secara garis besar, manfaat yang diprediksi dapat diberikan oleh hadirnya *website* Jaga Fakta di Kota Semarang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bagi masyarakat, pemerintah, dan swasta. Manfaat bagi masyarakat adalah rasa aman yang tercipta karena masyarakat punya satu platform sendiri yang terpercaya dalam memverifikasi laporan berita hoaks yang ditemukan. Kedua, bagi pemerintah akan

timbul rasa percaya dari masyarakat ke pemerintahan jika Jaga Fakta nantinya dinilai berhasil dalam menjalankan misinya. Terakhir, bagi swasta, *trust* swasta terhadap pemerintah juga akan naik sehingga iklim investasi pun akan meningkat. Kesimpulannya, *Website* Jaga Fakta memiliki beberapa manfaat yang dapat dihasilkan baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun swasta. Nilai atau *value* yang diberikan oleh hadirnya *website* Jaga Fakta akan memberikan efek domino yang positif jika Jaga Fakta berhasil menjadi media publikasi dan pengelolaan hoaks yang terpercaya di Kota Semarang.

Selanjutnya, analisa mendalam juga dilakukan dengan menggunakan lima indikator inovasi untuk menilai apakah inovasi Jaga Fakta dapat dipandang sebagai suatu inovasi yang baik atau tidak. Berikut adalah analisa lebih lanjut mengenai indikator-indikator inovasi:

1. Kelebihan dari Inovasi Sebelumnya (*Relative Advantage*). Penerapan suatu inovasi tentunya mengharapkan adanya kelebihan yang ditawarkan dari pendekatan sebelumnya. Kelebihan itu pun tidak terbatas pada “rebranding” atau efisiensinya saja, melainkan apakah inovasi tersebut nantinya dapat membawa manfaat atau dampak baru bagi masyarakat sebagai pengguna dan pemerintah sebagai penyelenggara. Kelebihan pertama yang muncul dari adanya *website* Jaga Fakta adalah faktualisasi rilis publik berita hoaks. Berdasarkan pendekatan sebelumnya, berita hoaks dikelola oleh kementerian terkait, yaitu Kominfo (saat ini Komdigi) dan membutuhkan waktu setidaknya satu minggu untuk diproses, dari

tahap awal penerimaan laporan atau temuan dugaan oleh tim patroli sampai rilis publik pada laman resmi. Jaga Fakta memberikan kelebihan atau nilai tambah yang cukup signifikan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah pusat, yang dalam hal ini adalah Komdigi, menjadi lebih mudah menyaring berita hoaks yang tersebar di Kota Semarang karena sudah terkumpul menjadi satu dan diolah di *website* Jaga Fakta, sedangkan dari sisi masyarakat, Jaga Fakta memberikan solusi untuk kemudahan akses dan keakuratan data yang faktual.

2. Kesesuaian (*Compability*). Salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu inovasi adalah *compatibility*, yaitu sejauh mana inovasi tersebut sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan kebiasaan masyarakat. Dalam konteks *Website* Jaga Fakta, penting untuk menganalisis apakah platform ini dapat diterima dan digunakan dengan mudah oleh masyarakat Kota Semarang. Melalui wawancara dengan berbagai pihak, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana *website* ini selaras dengan pola konsumsi informasi publik, serta apakah inovasi ini dapat beradaptasi dengan infrastruktur digital yang telah ada. Guna menjaga kesesuaian dan agar tetap relevan dengan nilai-nilai lokal yang dipegang masyarakat Semarang, tim PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di bawah naungan Diskominfo Kota Semarang, disebar di 177 kelurahan di seluruh Kota Semarang. Persebaran tim PPID tersebut menghasilkan iklim pertukaran informasi yang sangat cepat dari masyarakat ke pemerintah, maupun sebaliknya, sehingga informasi-informasi yang tersebar tetap relevan. Upaya untuk menyelaraskan misi pemberantasan hoaks dengan peningkatan

literasi digital juga dilakukan dengan menyebar-luaskan konten-konten tentang literasi digital yang sebelumnya sudah dibuat oleh Komdigi pada laman resmi Jaga Fakta. Tindakan ini dianggap sebagai langkah preventif dalam menghentikan arus penyebaran hoaks, karena jika masyarakat sudah “melek” digital, tentunya diharapkan hoaks-hoaks yang dianggap “kacangan” akan tersaring dengan sendirinya. Aspek *compability* atau kesesuaian dalam inovasi *website* Jaga Fakta berdasarkan analisa dan temuan penulis dapat dilihat dengan cukup baik. Hal itu didasari oleh adanya upaya Diskominfo dalam berusaha untuk menjadi lebih relevan dan selaras, baik kepada masyarakat maupun badan pemerintahan lainnya. Namun, masih terdapat ceruk kosong yang belum diisi Diskominfo dalam mengupayakan kesesuaian tersebut.

3. Tingkat Kerumitan (*Complexity*). Tingkat kompleksitas (*complexity*) dalam suatu inovasi menentukan sejauh mana pengguna merasa mudah atau sulit dalam mengadopsinya. Dalam konteks *Website* Jaga Fakta, penting untuk menganalisis apakah masyarakat mengalami kendala dalam mengakses, memahami, dan menggunakan platform ini. Jika mencoba melihat inovasi *website* Jaga Fakta dari indikator tingkat kerumitan atau *complexity*, Narasumber menjelaskan bahwa model *website* yang saat ini berupa *website* merupakan bentuk yang paling mudah digunakan oleh masyarakat, karena bisa diakses dimanapun, kapanpun, asal memiliki gawai yang memadai, dengan asumsi bahwa mayoritas masyarakat sudah memiliki *smartphone*. Diskominfo pun cukup percaya diri karena Dian menyatakan jika Diskominfo memiliki support system

dari pihak lain yang sudah sangat bagus. Kedepannya pun model publikasi akan coba dikembangkan ke model baru, yaitu menggunakan fitur *WhatsApp Blast*, dimana pengguna *WhatsApp* di Kota Semarang bisa langsung menerima informasi yang sudah diverifikasi oleh Jaga Fakta. Melihat analisis dan temuan penulis mengenai tingkat kerumitan atau *complexity* dari *website* Jaga Fakta di atas, bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ditemukan kerumitan yang signifikan baik dari penyelenggara maupun pengguna, hanya saja kendala ditemukan dalam proses pengembangan Jaga Fakta lebih lanjut nantinya serta masyarakat yang mengharapkan Jaga Fakta terus berbenah dan mempermudah pilihan *platformnya*.

4. Uji Coba Sebelumnya (*Triability*). *Triability* merupakan faktor yang menentukan sejauh mana suatu inovasi dapat diuji coba sebelum diadopsi secara luas oleh masyarakat. Dalam konteks *Website* Jaga Fakta, penting untuk menganalisis apakah platform ini memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mencoba dan memahami fungsinya sebelum menggunakannya secara rutin. *Website* Jaga Fakta sebelum resmi diluncurkan ke publik sudah melalui proses uji coba terlebih dahulu, atau lebih tepatnya pemantauan langsung dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi (pada saat itu Kominfo). Hal tersebut wajib dilakukan karena Komdigi menerapkan aturan bahwa segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan verifikasi hoaks harus dinaungi oleh Komdigi, dan proses tersebut berjalan dengan datangnya perwakilan Komdigi ke Diskominfo Kota Semarang untuk melihat proses verifikasi hoaks di Jaga

Fakta. Setelah dinyatakan layak sesuai standar, Jaga Fakta pun dapat dirilis secara resmi, dan pada acara launching Jaga Fakta pun dihadiri langsung oleh jajaran Kementerian Komunikasi dan Digital. *Standard Operatin Procedure* (SOP) yang diadopsi oleh tim Jaga Fakta pun sama seperti SOP yang digunakan oleh Komdigi.

5. Kemudahan Untuk Diamati (*Observability*). *Observability* mengacu pada sejauh mana manfaat dan dampak dari suatu inovasi dapat diamati oleh masyarakat. Dalam konteks *Website* Jaga Fakta, penting untuk menilai apakah keberadaan dan fungsi *website* ini sudah terlihat secara luas serta memberikan efek nyata dalam menanggulangi hoaks di Kota Semarang. *Website* Jaga Fakta dari segi *observability* bisa dibilang belum dapat diukur dengan pasti. Hal ini disebabkan oleh umur Jaga Fakta yang masih sangat muda sehingga Diskominfo belum bisa melakukan survey atau meluncurkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM ini lah yang menjadi faktor penentu untuk menilai keberhasilan Jaga Fakta di mata masyarakat, karena di dalam SKM ini lah terdapat indikator-indikator keberhasilan yang dapat diukur secara empiris.

Adapun analisa Jaga Fakta menggunakan lima kode etik *fact-checking* dari *International Fact-Checking Network* (IFCN) adalah sebagai berikut:

1. Netralitas. Netralitas (*A Commitment to non-Partisanship and Fairness*), sesuai dengan arti katanya, dapat ditafsirkan menjadi kemampuan untuk tetap netral atau tidak memihak pihak manapun dalam menentukan suatu pilihan. Dalam konteks

penelitian ini, netralitas Jaga Fakta akan coba dianalisa dengan melihat apakah Jaga Fakta dalam mengelola hoaks dan mempublikasikannya mendapat pengaruh atau tekanan dari pihak lain, serta memiliki kecondongan sendiri ke satu pihak. Dalam keterangannya, narasumber menerangkan bahwa salah satu motivasi utama untuk membuat Jaga Fakta adalah momen tahun politik 2024, dimana pada tahun itu diadakan pemilihan presiden dan pilkada serentak di Indonesia. Lebih dalam lagi, Dian menambahkan bahwa dirasa perlu untuk dibentuknya *platform* anti-hoaks guna menetralsir isu-isu hoaks, terutama yang bermuatan politik. Jika dianalisa secara harfiah, maka upaya untuk menetralsir disinformasi isu politik yang beredar dapat dianggap memenuhi komitmen untuk netral sesuai kode etik dari IFCN. Namun, terlalu naif rasanya bila menganalisa netralitas hanya dari satu sisi dan percaya mentah-mentah. Netralitas rasanya memiliki definisi yang lebih luas dibandingkan hanya dengan upaya untuk netral, karena jangan sampai *website* Jaga Fakta yang diproyeksikan untuk menjadi sumber kebenaran masyarakat Kota Semarang justru malah menjadi alat propaganda pemerintah dalam mengklarifikasi *blunder-blunder* yang terjadi.

2. Transparansi Sumber Informasi. Transparansi sumber atau *A Commitment to Standards and Transparency of Sources* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa darimana saja sumber yang digunakan Jaga Fakta dalam memverifikasi hoaks. Transparansi sumber dapat dikatakan terpenuhi jika masyarakat sebagai pengguna Jaga Fakta dapat melihat sumber yang dicantumkan pada publikasi hoaks di *website*

Jaga Fakta sebagai bukti yang jelas. Jika melihat dari publikasi yang ada pada laman Jaga Fakta, tidak terdapat keterangan sumber resmi dari mana berita hoaks itu diverifikasi. Publikasi hoaks hanya berisi keterangan bahwa berita tersebut dinyatakan hoaks dan tidak benar, tanpa mencantumkan justifikasi yang relevan. Tidak adanya transparansi sumber dikhawatirkan dapat memunculkan stigma negatif atau keraguan dari pembaca mengenai kebenaran publikasi tersebut, karena jika ingin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah seperti yang sudah disinggung pada analisa sebelumnya, seharusnya pemerintah juga bisa menyertakan sumber yang kredibel, atau minimal menjelaskan dari OPD atau badan mana isu hoaks tersebut diklarifikasi.

3. Transparansi Pendanaan. Transparansi pendanaan (*A Commitment to Transparency of Funding and Organization*) pada penelitian ini sayangnya belum dapat dianalisa secara mendalam. Berdasarkan hasil wawancara, aspek transparansi pendanaan dari Jaga Fakta memang tidak disebutkan secara langsung oleh narasumber. Namun, dapat diasumsikan bahwa sebagai bagian dari inovasi Diskominfo Kota Semarang, *website* ini dikelola di bawah struktur pemerintahan resmi, yang artinya penggunaan anggaran umumnya mengikuti mekanisme APBD dan prosedur publik yang dapat diaudit. Ini mengindikasikan bahwa pendanaannya berada dalam kerangka anggaran negara yang pada prinsipnya bersifat terbuka. Dari sisi organisasi, Kanal Jaga Fakta disebut melibatkan berbagai *stakeholder*. Keterlibatan institusi seperti Kominfo pusat, Komdigi, dan tim PPID dari kelurahan menunjukkan adanya kolaborasi

antarlembaga yang berperan dalam proses verifikasi. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun belum sepenuhnya transparan, kanal ini menunjukkan potensi untuk mengarah pada model pengelolaan yang lebih terbuka jika dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, indikator “*transparency of funding and organization*” dari IFCN belum sepenuhnya terpenuhi, tetapi masih dapat dijustifikasi melalui posisi Jaga Fakta sebagai produk kelembagaan resmi dan kolaboratif dalam ranah pemerintahan.

4. Transparansi Metodologi. Transparansi Metodologi atau *A Commitment to Standards and Transparency of Methodology* mengacu pada seberapa transparan Jaga Fakta dalam memberikan informasi mengenai metodologi atau cara apa yang digunakan dalam memverifikasi isu hoaks yang beredar. Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa Kanal Jaga Fakta memiliki pola kerja yang kolaboratif dan sistematis dalam proses verifikasi informasi. Dengan melibatkan stakeholder yang relevan—seperti kepolisian untuk isu kamtibmas, KPU dan Bawaslu untuk isu pilkada, serta BPJS untuk isu kesehatan—Diskominfo Semarang menunjukkan bahwa setiap hoaks ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi langsung terhadap isu tersebut. Praktik ini mengindikasikan adanya metodologi verifikasi yang berbasis jejaring, bukan hanya satu sumber internal. Selain itu, keterlibatan media dan PPID dari kelurahan menunjukkan bahwa kanal ini tidak bekerja secara tertutup, melainkan membuka akses kerja sama dengan pihak eksternal. Namun sayangnya, proses di atas tidak ikut dipublikasi pada laman Jaga Fakta, sehingga menimbulkan kesan bahwa metodologi yang

digunakan kurang transparan karena masyarakat sebagai pengguna dan pembaca tidak langsung mengetahui proses-proses tersebut.

5. Keterbukaan pada Kritik. Dalam konteks *fact-checking* IFCN, keterbukaan terhadap kritik (*A Commitment to an Open & Honest Corrections Policy*) merupakan bagian penting dari integritas dan akuntabilitas sebuah platform verifikasi fakta. Namun, pada kasus Kanal Jaga Fakta Kota Semarang, keterbukaan terhadap kritik masih belum dapat dievaluasi secara menyeluruh. Hal ini disebabkan belum dirilisnya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berfungsi sebagai salah satu instrumen utama bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, kritik, atau sanggahan terhadap konten yang dipublikasikan. Dengan demikian, meskipun *website* ini sudah menunjukkan niat untuk membangun sistem yang transparan dan inklusif, belum tersedia mekanisme formal yang terdokumentasi untuk menampung dan merespons kritik secara sistematis. Oleh karena itu, pada tahap ini indikator “*honest corrections policy*” dari IFCN belum dapat dianalisis secara utuh, dan sebaiknya direkomendasikan agar Jaga Fakta ke depannya menyertakan fitur umpan balik terbuka berbasis SKM atau media interaktif lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa Jaga Fakta menggunakan tidak teori di atas, *website* Jaga Fakta merupakan inovasi *e-government* yang lahir dari kebutuhan mendesak menjaga ekosistem informasi yang sehat di Kota Semarang. Inisiatif ini didorong oleh

tantangan penyebaran hoaks, terutama menjelang Pilkada 2024, serta peran Diskominfo dalam memastikan iklim informasi yang kondusif. Dari sudut pandang *e-government*, inovasi ini menunjukkan dukungan kuat (*support*) dari berbagai pihak, kapasitas pengelolaan yang baik (*capacity*) melalui SDM dan SOP yang jelas, serta memberikan nilai (*value*) strategis bagi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Selain itu, inovasi ini terbukti memiliki keunggulan relatif, kesesuaian dengan sistem yang ada, serta telah melalui tahap uji coba, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek teknis dan observabilitas dampaknya.

Namun, evaluasi berdasarkan lima indikator dari *International Fact-Checking Network (IFCN)* menunjukkan bahwa meskipun *Website* Jaga Fakta berupaya menjaga netralitas dan akurasi informasi, masih terdapat kekurangan dalam aspek transparansi, seperti sumber data, pendanaan, dan proses verifikasi. Keterbukaan terhadap kritik dan partisipasi publik pun belum terfasilitasi secara optimal. Oleh karena itu, agar inovasi ini tetap relevan dan efektif dalam menangkal hoaks di era digital, diperlukan penguatan fitur teknologi, peningkatan transparansi, serta kolaborasi lintas sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan inovasi *Website*

Jaga Fakta di Kota Semarang, diantaranya adalah evaluasi berkelanjutan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kolaborasi dan sosialisasi, pembuatan SOP dan pedoman implementasi yang lebih komprehensif, serta optimalisasi manfaat bagi *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- Daly, D. (2024). *Immersive Truth: How Groups and their Stories Construct and Deconstruct Propaganda in the Digital Age*. Arizona: The University of Arizona.
- Fabry, M. (2017, Agustus 24). *Here's How the First Fact-Checkers Were Able to Do Their Jobs Before the Internet*. Retrieved from YahooNews: https://www.yahoo.com/news/first-fact-checkers-were-able-140015859.html?guccounter=1&guc_e_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guc_e_referrer_sig=AQAAAA4upX-jjkhrgpIjiLcXqnBHHmiJd7PBna8ELgHtef5dpZcvF8uAxcijHwiw5gcjeuQNojA5oTHp82kLL8aHbycHghI4z pFLGBfScs
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*.
- Kelman, S. (2005). Public Management Needs Help. *The Academy of Management Journal*, 48 (6), 967-969.
- Komdigi. (2024, September 12). *[HOAKS] Larvasida dan Fogging Berbayar*

Mengatasnamakan Dinkes Kota Semarang. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Digital: <https://www.komdigi.go.id/berita/klarifikasi-hoaks/detail/hoaks-larvasidan-fogging-berbayar-mengatasnamakan-dinkes-kota-semarang>

Laeis, Z. (2024, Agustus 10). *Diskominfo Semarang siapkan kanal Jaga Fakta untuk tangkal hoaks.* Retrieved from Antara Jateng: <https://jateng.antaranews.com/berita/543567/diskominfo-semarang-siapkan-kanal-jaga-fakta-untuk-tangkal-hoaks>

PPID Kota Semarang. (2024, Oktober 24). *Uji Visitasi, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Kunjungi Pemkot Semarang.* Retrieved from PPID: <https://ppid.semarangkota.go.id/uji-visitasi-komisi-informasi-provinsi-jawa-tengah-kunjungi-pemkot-semarang/>

Rodgers, E. M. (1983). *Diffusion of Innovations.* London: The Free Press.